

SURAT KUASA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Muhammad Fajri**

Sebagai calon Wakil Bupati Klaten tahun 2020

Memberikan kuasa kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten untuk mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Pribadi/ Pejabat negara (LHKPN) hasil penelitian dan/atau klarifikasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada masyarakat.

Demikian surat kuasa ini kami sampaikan, untuk menjadikan maklum.

Klaten, 28 Oktober 2020

Pemberi Kuasa



Muhammad Fajri



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 September 2020/Khusus - Calon PN)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KPUD (CALON KEPALA DAERAH)
UNIT KERJA : PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
SUB UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MUHAMMAD FAJRI**
2. Jabatan : **CALON WAKIL BUPATI**
3. NHK : **759697**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 290 m²/360 m² di KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 421.500.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. MOTOR, KAWASAKI ZX 130 Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, DAIHATSU TAFT Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 28.400.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.500.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 5.449.900.000

III. HUTANG Rp. 600.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.849.900.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **24 September 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.